



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**Pemohon Uji KUHAP Perbaiki Permohonan**

**Jakarta, 26 Mei 2020** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Hukum Acara Pidana (KUHAP), pada Kamis (11/6), pukul 11.00 WIB di ruang sidang MK dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 26/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Azwarmi als Armi. Norma yang diajukan untuk diuji adalah Pasak 182 ayat (4), Pasal 183, Pasal 184 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Pemohon menjelaskan bahwa dirinya dijatuhi hukuman karena terbukti tanpa hak, menguasai, membawa, sesuatu senjata api atau bahan peledak secara tidak sah, tidak berdasarkan surat dakwaan melainkan berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan. Pemohon menyatakan dalam pembuktian tidak boleh hanya berdasarkan keterangan saksi dan keterangan ahli dari JPU sebagaimana alat bukti yang dipertimbangkan hakim dalam mepidana Pemohon diperoleh dalam proses penyidikan, harus berdasarkan keterangan saksi dan ahli dalam persidangan agar tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 terkait perlakuan diskriminatif.

Pemohon juga berpendapat bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana berdasarkan keyakinan hakim, harus mempertimbangkan keterangan saksi dan keterangan ahli terdakwa, tidak dapat hanya berdasarkan dua alat bukti yang dapat diperoleh dari JPU dan apabila JPU dan Terdakwa masing-masing mengajukan alat bukti yang sama kuatnya maka pembuktian yang terkuat adalah yang mengajukan alat bukti yang lebu banyak agar tidak bertentangan dengan Pasal 28D dan Pasal 28I UUD 1945.

Terhadap dalil-dalil para Pemohon, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyampaikan bahwa identitas pemohon serta kerugian konstitusional yang dialami harus jelas dan dikaitkan dengan norma yang diuji. Sehingga, ia meminta pemohon untuk melihat permohonan-permohonan yang terdapat pada laman MK. (Tiara Agustina)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, Twitter. @Humas\_MKRI. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)